

PENDAMPINGAN PENGINPUTAN DATA KLHS KE DALAM INTEGRASI RPJMD KABUPATEN SBB TAHUN 2025-2029

Andiah Nurhaeny¹, Pahrul Idham Kaliky²

Program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas teknik, Universitas Pattimura¹
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Pattimura²
e-mail: andiah.nurhaeny@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029. Kegiatan ini berangkat dari kondisi lemahnya kualitas data sektoral serta kurangnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berdampak pada rendahnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di dokumen perencanaan daerah. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan para ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota, lingkungan, sosial, dan sistem informasi geografis (GIS). Rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan dan verifikasi data capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), analisis terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta validasi hasil melalui forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan data TPB hingga mencapai 75%, tersusunnya data kondisi umum daerah dan lingkungan hidup, serta identifikasi enam isu strategis pembangunan berkelanjutan yang kemudian diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RPJMD. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola data, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta membuka peluang pengembangan sistem pendampingan digital berbasis GIS guna memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

Kata Kunci: *Kajian Lingkungan Hidup Strategis, RPJMD, Pembangunan Berkelanjutan*

ABSTRACT

This community service program was conducted to strengthen the capacity of the Government of West Seram Regency in integrating the Strategic Environmental Assessment (SEA/KLHS) into the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) for the 2025–2029 period. The activity was initiated in response to the limited quality of sectoral data and weak coordination among Regional Apparatus Organizations (OPDs), which have hindered the implementation of sustainable development principles in regional planning documents. A participatory and collaborative approach was applied by involving experts in urban and regional planning, environmental studies, social development, and Geographic Information Systems (GIS). The main stages included the collection and verification of Sustainable Development Goals (SDG) achievement data, the analysis of environmental carrying and assimilative capacities, and the validation of results through public consultation forums engaging various stakeholders. The mentoring process resulted in an increase in SDG data availability up to 75%, the preparation of regional and environmental baseline data, and the identification of six strategic sustainable development issues integrated into the Policies, Plans, and Programs (KRP) of the RPJMD. Overall, this activity significantly improved data governance and evidence-based decision-making, while also opening opportunities for developing a GIS-based digital assistance system to support sustainable and adaptive regional development planning.

Keywords: *Strategic Environmental Assessment, RPJMD, Sustainable Development*

Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan wilayah bahari di Provinsi Maluku dengan luas sekitar 5.017 km² yang terdiri atas 11 kecamatan dan 92 desa. Wilayah ini memiliki 52 pulau dengan potensi sumber daya pesisir yang tinggi serta ekosistem bernilai konservasi penting bagi arah pembangunan daerah. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten SBB sebagai kawasan yang rawan terhadap tekanan lingkungan sekaligus kaya akan potensi ekonomi kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terwujud secara nyata.

Prinsip pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara regulatif, pelaksanaan KLHS diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 menegaskan enam komponen utama KLHS yang wajib diintegrasikan dalam perencanaan daerah, seperti analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat bagi daerah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan.

Dalam praktiknya, penyusunan KLHS yang ideal memerlukan ketersediaan data sektoral yang lengkap, koordinasi lintas-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sinergis, serta kemampuan teknis aparatur dalam mengelola data capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi KLHS di banyak daerah masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Susanti dan Kurniawan (2022) mengungkapkan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam integrasi rekomendasi lingkungan ke dalam program daerah. Sementara itu, Afifah et al. (2023) menyoroti keterbatasan pemanfaatan data capaian pembangunan yang berpengaruh terhadap rendahnya kualitas dokumen perencanaan. Sejalan dengan temuan tersebut, Putra et al. (2024) menjelaskan bahwa integrasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kebijakan daerah sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan lemahnya sistem tata kelola data.

Kajian terbaru juga menegaskan pentingnya tata kelola lingkungan yang partisipatif dan inklusif sebagai dasar keberhasilan penyusunan KLHS. Loperte et al. (2024) menunjukkan bahwa model tata kelola lingkungan berbasis partisipasi masyarakat mampu meningkatkan transparansi dan legitimasi sosial dalam pengambilan keputusan pembangunan. Selanjutnya, Umam et al. (2021) menyatakan bahwa penerapan analisis spasial dalam penyusunan KLHS dapat memperkuat kapasitas adaptasi daerah terhadap risiko lingkungan dan perubahan iklim. Dengan demikian, integrasi pendekatan partisipatif dan teknologi spasial menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Kondisi di Kabupaten SBB menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan. Berdasarkan hasil identifikasi awal, sejumlah isu strategis pembangunan berkelanjutan masih perlu mendapat perhatian, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial antarwilayah, keterbatasan konsumsi pangan dan gizi, rendahnya akses terhadap layanan

kesehatan dan pendidikan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta degradasi lingkungan di kawasan pesisir. Permasalahan ini diperparah dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan rendahnya integrasi data antar-OPD. Dalam konteks tersebut, penerapan teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) menjadi salah satu pendekatan penting untuk memetakan keterkaitan spasial antarindikator pembangunan dan menentukan wilayah prioritas intervensi (Placidi et al., 2024). Penggunaan GIS terbukti dapat meningkatkan akurasi analisis serta mempermudah komunikasi hasil kepada pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Selain aspek teknis, keterlibatan aktif pemangku kepentingan lintas sektor juga menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi KLHS ke dalam RPJMD. Zellner (2024) menegaskan bahwa pendekatan *participatory modeling* efektif untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan lingkungan. Bandari et al. (2023) juga menyebutkan bahwa model partisipatif dalam konteks SDGs membantu mengidentifikasi interaksi antar-tujuan pembangunan dan memperkuat sinergi kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, peran partisipasi publik dan koordinasi lintas sektor harus dipandang sebagai elemen inti dalam penyusunan KLHS yang adaptif dan kontekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan intervensi strategis berupa peningkatan kapasitas teknis aparatur daerah melalui kegiatan pendampingan yang bersifat kolaboratif dan berbasis teknologi digital. Pendampingan ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data KLHS berbasis TPB dengan dukungan sistem digital berbasis GIS. Inovasi utama kegiatan ini terletak pada penerapan model *mentoring* kolaboratif antara akademisi dan pemerintah daerah yang tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja partisipatif, transparan, dan berorientasi pada bukti. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi daerah lain dalam mewujudkan integrasi pembangunan berkelanjutan berbasis data dan teknologi digital.

METODE PELAKSANAAN

Bagian metode harus ditulis singkat, padat, jelas, tetapi mencukupi. Ia menjelaskan penggunaan metode pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, alat, bahan, atau instrumen harus dijelaskan dengan baik, namun bukan berupa teori. Jika dipandang perlu, ada lampiran mengenai kisi-kisi instrumen atau penggalan bahan yang digunakan. Jika ada rumus-rumus statistik yang digunakan sebagai bagian dari metode, rumus yang sudah umum digunakan tidak perlu ditulis. Misalnya, ada ketentuan spesifik yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data dijelaskan pada bagian metode ini.

Tim penyusun KLHS–RPJMD terdiri dari empat tenaga ahli dengan bidang keahlian perencanaan wilayah dan kota, sosial, teknik lingkungan, dan sistem informasi geografis. Proses analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk menghasilkan dokumen yang memuat gambaran kondisi umum daerah, mencakup aspek geografis, daya dukung dan daya tampung lingkungan, demografi, serta kondisi keuangan daerah. Validasi data dilakukan melalui *cross-check* antar-OPD, *peer review* internal oleh tim ahli, serta konsultasi publik dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan substantif dan meningkatkan akurasi hasil. Seluruh proses kegiatan didokumentasikan secara berkelanjutan guna menjamin keterlacakkan dan keabsahan data. Keluaran akhir kegiatan berupa data terverifikasi dan analisis komprehensif yang dapat dijadikan dasar penyusunan RPJMD yang terintegrasi dengan KLHS secara sistematis dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pendampingan penginputan data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas aparatur Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri No. 7 Tahun 2018, Permen LHK No. 69 Tahun 2017, serta Perpres No. 11 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tahapan pelaksanaan dimulai dari *Kick-Off Meeting* untuk pembentukan Tim Pokja KLHS–RPJMD, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan verifikasi data capaian TPB dari seluruh OPD menggunakan format digital berbasis Excel. Selanjutnya dilakukan analisis data lingkungan dan sosial menggunakan perangkat lunak QGIS dan VSIM untuk menilai daya dukung, daya tampung, serta isu lingkungan strategis. Proses validasi dan penjaminan kualitas hasil dilakukan melalui kolaborasi antara DLH, Bappeda, dan tim ahli guna memastikan keakuratan data dan keterpaduan hasil analisis lintas sektor.

Peningkatan ketersediaan data TPB merupakan hasil yang paling menonjol dari kegiatan ini. Sebelum pendampingan, data TPB belum lengkap dan sebagian besar indikator belum terisi dengan baik. Setelah pendampingan, kelengkapan data meningkat signifikan hingga mencapai 75% dari total indikator relevan. Hasil ini mencerminkan peningkatan kapasitas teknis aparatur daerah dan perbaikan tata kelola data sektoral. Untuk memperlihatkan kondisi tersebut secara lebih sistematis, disajikan Tabel 1 berikut yang menampilkan rekapitulasi ketersediaan data TPB Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 1. Rekap Ketersediaan Data TPB Kabupaten Seram Bagian Barat

Kategori	Keterangan	Jumlah	Percentase
SS	Sudah Dilaksanakan & Mencapai Target Nasional	74	36%
SB	Sudah Dilaksanakan & Belum Mencapai Target Nasional	74	36%
BB	Belum Dilaksanakan & Belum Mencapai Target Nasional	5	3%
NA	Tidak Ada Data	51	25%
Total		204	100%

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, sebagian besar indikator telah dilaksanakan dengan capaian yang cukup baik. Kategori “SS” dan “SB” masing-masing memiliki proporsi 36%, menunjukkan bahwa hampir tiga perempat indikator TPB sudah dijalankan meskipun belum seluruhnya memenuhi target nasional. Kategori “NA” sebesar 25% mengindikasikan masih adanya kendala dalam pelaporan data di sektor tertentu, terutama akibat keterbatasan sumber daya dan sinkronisasi antarinstansi. Secara umum, capaian ini menggambarkan keberhasilan kegiatan pendampingan dalam memperkuat sistem pelaporan data berbasis bukti dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi data lintas sektor.

Selain peningkatan kelengkapan data, kegiatan ini juga berdampak positif terhadap partisipasi OPD dalam proses penginputan dan pelaporan data. Sebelum pendampingan, pelaporan masih dilakukan secara manual dan hanya sebagian kecil OPD yang aktif berpartisipasi. Setelah kegiatan, hampir seluruh OPD telah terlibat menggunakan sistem digital terintegrasi. Perubahan ini menunjukkan terbangunnya budaya kerja baru yang lebih kolaboratif dan efisien. Tabel 2 berikut menyajikan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan.

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Aspek	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Jumlah OPD yang menginput data TPB	12 dari 29 OPD (41%)	28 dari 29 OPD (97%)
Kelengkapan data indikator TPB	45% indikator terisi	75% indikator terisi
Pemahaman konsep TPB	Rendah, belum terstandar	Tinggi, terintegrasi dalam perencanaan
Mekanisme pelaporan	Manual (Excel terpisah)	Digital (template terintegrasi)
Keterlibatan masyarakat	Terbatas pada konsultasi publik	Terlibat aktif melalui dua tahap konsultasi

Berdasarkan Tabel 2, terjadi peningkatan signifikan dalam berbagai aspek. Partisipasi OPD meningkat dari 41% menjadi 97%, sedangkan kelengkapan data indikator TPB naik dari 45% menjadi 75%. Mekanisme pelaporan yang sebelumnya manual kini telah bertransformasi menjadi sistem digital dengan format terintegrasi, memudahkan pelacakan dan verifikasi data. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui dua tahap konsultasi publik menunjukkan peningkatan penerapan prinsip *inclusive governance* dalam perencanaan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan pendampingan berbasis kolaborasi mampu mendorong perubahan kelembagaan menuju tata kelola pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sepuluh kriteria yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2016, diperoleh enam isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Keenam isu tersebut meliputi: (1) tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial antarwilayah, (2) tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum efektif, (3) pengembangan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, (4) pelayanan infrastruktur dasar yang belum merata dan masih rendah kualitasnya, (5) keterbatasan diversifikasi ekonomi lokal serta ketergantungan pada sektor rentan, dan (6) degradasi lingkungan daratan dan pesisir akibat pemanfaatan sumber daya alam yang belum berkelanjutan. Identifikasi isu ini dilakukan melalui pendekatan analisis spasial berbasis GIS untuk memastikan keterkaitan antarindikator dan menentukan wilayah prioritas intervensi kebijakan.

Seluruh hasil analisis, capaian data TPB, dan isu strategis tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029. Integrasi ini memastikan setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan, risiko sosial-ekonomi, serta relevansinya terhadap indikator TPB. Hasil integrasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi strategis seperti penguatan program perlindungan sosial berbasis komunitas, diversifikasi pangan lokal, digitalisasi layanan kesehatan primer, rehabilitasi ekosistem pesisir dan hutan desa, serta peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Sebagai pelengkap penyajian hasil, dokumentasi kegiatan pendampingan turut ditampilkan pada Gambar 1. Gambar ini memperlihatkan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang melibatkan aparatur pemerintah daerah, tim ahli, dan masyarakat dalam proses pengumpulan serta validasi data. Visualisasi ini memberikan gambaran konkret mengenai suasana kegiatan pengabdian dan interaksi antarunsur pelaksana yang menjadi bagian penting dari keberhasilan program pendampingan.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan

Gambar 1 menunjukkan suasana kegiatan yang berlangsung secara partisipatif dan interaktif. Aparatur OPD tampak aktif dalam proses pelatihan serta diskusi teknis mengenai penginputan dan validasi data TPB. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sesi pelatihan teknis, tetapi juga sebagai forum belajar kolaboratif yang memperkuat koordinasi antarinstansi. Dokumentasi ini sekaligus memperlihatkan wujud nyata dari pendekatan *capacity building* yang diterapkan, di mana aspek pembelajaran kelembagaan dan pemberdayaan menjadi elemen kunci dalam keberhasilan kegiatan pendampingan.

Pembahasan

Model pendampingan penginputan data KLHS ke dalam proses integrasi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memperlihatkan karakteristik yang khas dibandingkan dengan model pendampingan teknis di daerah lain. Ciri utama model ini terletak pada sinergi antara penerapan analisis spasial berbasis GIS, digitalisasi format pelaporan capaian TPB, serta mekanisme konsultasi publik dua tahap yang melibatkan multi-aktor dari berbagai sektor. Kombinasi tersebut bukan hanya menghasilkan peningkatan teknis dalam pengolahan data, tetapi juga membentuk pola kerja baru di lingkungan birokrasi yang lebih kolaboratif, transparan, dan responsif terhadap inovasi digital. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi konseptual terhadap literatur pengabdian masyarakat, karena memfokuskan perubahan kelembagaan dan budaya kerja aparatur, bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis semata.

Hasil pendampingan menjadi semakin bermakna ketika ditinjau melalui perspektif *collaborative governance*. Menurut Ansell dan Torfing (2021), keberhasilan kolaborasi lintas sektor bergantung pada kepercayaan, komunikasi berulang, serta koordinasi formal yang efektif. Prinsip tersebut tercermin dalam peningkatan partisipasi OPD dari 41% menjadi 97% selama proses pendampingan, yang menunjukkan terbentuknya sistem koordinasi yang lebih solid dibandingkan kondisi sebelumnya. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif menjadi faktor penentu efektivitas integrasi KLHS, berbeda dengan temuan Sugiarkha et al. (2024) di Kabupaten Karangasem, Bali, yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya komunikasi antarpemangku kepentingan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis kolaborasi.

Selain menunjukkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor, kegiatan ini juga mencerminkan proses capacity building kelembagaan yang signifikan. Menurut UNDP (2022), kapasitas institusional meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Dalam konteks ini, peningkatan kelengkapan data dari 45% menjadi 75% mencerminkan adanya *learning behaviour* aparatur terhadap pentingnya standardisasi indikator pembangunan. OECD (2019) turut memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan berbasis data mendorong efisiensi

perencanaan daerah melalui pemetaan risiko yang lebih terukur, sehingga memperbaiki kualitas formulasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dari perspektif *evidence-based planning*, penerapan perangkat lunak QGIS dan VSIM terbukti meningkatkan validitas analisis daya dukung-daya tampung lingkungan serta memperkuat akurasi identifikasi wilayah berisiko tinggi terhadap degradasi. Temuan ini sejalan dengan studi tentang “Integrasi Geographic Information System dalam Pengelolaan Unit Struktur Kelurahan” oleh Permatasari et al. (2024) yang menunjukkan bahwa GIS membantu dalam pengumpulan, penyimpanan dan analisis data spasial untuk pengambilan keputusan wilayah. Studi lain oleh Wijayanti et al. (2024) tentang “Pemanfaatan GIS dalam Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah” menunjukkan bahwa pemetaan berbasis GIS meningkatkan kesesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi eksisting, sehingga mengurangi bias analisis manual. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi spasial menjadi instrumen kunci dalam memperkuat basis data dan meningkatkan akuntabilitas kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan konsultasi publik dua tahap menjadi komponen penting dalam memperkuat legitimasi sosial hasil analisis KLHS. Putra et al. (2024) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan determinan utama penerimaan publik terhadap dokumen lingkungan, sementara Sephia (2024) menemukan bahwa praktik *collaborative governance* dalam forum Musrenbang meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil perencanaan daerah. Temuan ini juga tercermin di Kabupaten SBB, di mana partisipasi multipihak tidak hanya memperluas proses deliberasi publik, tetapi juga memastikan bahwa rekomendasi KLHS disusun berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memperkuat dimensi teknokratik, tetapi juga meneguhkan aspek legitimasi dan representasi publik dalam penyusunan kebijakan.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan pendampingan ini mendorong terjadinya *organizational learning*, di mana aparatur mulai beralih dari pola kerja administratif menuju tata kelola berbasis data dan verifikasi berulang. Loperte et al. (2024) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan partisipatif mampu memperkuat legitimasi kebijakan dan mengurangi resistensi terhadap implementasi program baru. Hal ini diperkuat oleh Mujiansyah (2024) yang menunjukkan bahwa sinergi antara data spasial dan kolaborasi multisektor berkontribusi terhadap percepatan pencapaian SDGs di wilayah Indonesia Timur. Keberhasilan Kabupaten SBB juga dipengaruhi oleh keterlibatan akademisi lokal dalam proses pendampingan, terbentuknya *shared understanding* antar-aktor, serta tingginya *responsiveness* OPD terhadap sistem digitalisasi data.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperluas wacana tentang tata kelola pembangunan berkelanjutan dengan menegaskan bahwa keberhasilan integrasi KLHS ke dalam RPJMD sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: arsitektur *collaborative governance*, kapasitas kelembagaan data, dan legitimasi publik melalui partisipasi multipihak. Model pendampingan yang dikembangkan di Kabupaten SBB dapat direplikasi oleh daerah lain melalui penerapan template digital pelaporan indikator TPB, pembentukan unit verifikasi spasial antar-OPD, pelaksanaan forum konsultasi publik bertahap, serta integrasi GIS dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi praktis terhadap transformasi birokrasi menuju tata kelola pembangunan yang adaptif, transparan, dan berbasis bukti.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan penginputan data KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan antara idealitas Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

pembangunan berkelanjutan dan kapasitas kelembagaan di daerah. Pendampingan ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan proses pembelajaran kelembagaan yang menumbuhkan budaya kerja kolaboratif dan berbasis data. Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintah daerah belajar mengintegrasikan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih terukur dan terkoordinasi lintas sektor. Proses ini menunjukkan pergeseran paradigma menuju tata kelola pembangunan yang adaptif, transparan, dan berbasis bukti.

Capaian utama kegiatan berupa peningkatan ketersediaan data TPB hingga 75% dan keberhasilan integrasi hasil analisis KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RPJMD. Hasil ini tidak hanya merefleksikan keberhasilan teknis, tetapi juga perubahan pola kerja aparatur yang lebih sistematis dan kolaboratif. Penerapan teknologi geospasial turut memperkuat efektivitas analisis serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 171–178. <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/62402>
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation*. Cambridge University Press.
https://assets.cambridge.org/97810093/80409/frontmatter/9781009380409_frontmatter.pdf
- Bandari, R., Moallemi, E. A., Szetey, K., Flanagan-Smith, C., Hadjikakou, M., Marcos-Martinez, R., Kharrazi, A., Šakić Trogrlić, R., & Bryan, B. A. (2023). Participatory modeling for analyzing interactions between high-priority Sustainable Development Goals to promote local sustainability. *Earth's Future*, 11(12), e2023EF003948. <https://doi.org/10.1029/2023EF003948>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38782>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37931>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 240). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254545>
- Loperte, S., Capolupo, A., & Ciarcia, C. (2024). An environmental participatory governance (EPG) model for the ecological transition: The case of the Basilicata region. *Sustainability*, 16(2), 674. <https://doi.org/10.3390/su16020674>

- Mujiansyah, M. (2024). *Peran kolaborasi multi-sektor dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin]. UIN Antasari Repository. <https://idr.uin-antasari.ac.id/27919/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *The path to becoming a data-driven public sector*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/the-path-to-becoming-a-data-driven-public-sector.pdf>
- Permatasari, I., Hakim, B. P., Anugraha, R. A., & Sjafrizal, T. (2024). Integrasi Geographic Information System dalam pengelolaan unit struktur kelurahan. *International Journal of Community Service Learning, 8(4)*, 449–454. <https://doi.org/10.23887/ijcs.v8i4.82876>
- Placidi, V., Cenci, M., Castellani, F., & Falasca, M. (2024). The role of GIS data post-processing in environmental assessment: The case of Umbria, Italy. *Urban Science, 8(1)*, 19. <https://doi.org/10.3390/urbansci8010019>
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the sustainable development goals into a regional development plan in Indonesia. *Sustainability, 16(23)*, 10235. <https://doi.org/10.3390/su162310235>
- Sephia, J. (2024). Analisis collaborative governance pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan: Studi kasus Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan & Administrasi Publik, 6(1)*, 13–26. <https://repository.stialan.ac.id/id/eprint/145/>
- Sugiarktha, I. K., Supriatna, N., & Sartika, D. (2024). Collaborative governance in local development planning for annual local work planning in Karangasem Regency, Bali, Indonesia. *International Journal of Educational Development and Research, 2(1)*, 45–57. <https://journal.yrpipku.com/index.php/ijedr/article/view/3516>
- Susanti, T., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD periode 2021–2026 sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban. *Publika, 10(2)*, 231–244. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44639>
- Umam, A. H., Prasetyo, Y., & Sudradjat, A. (2021). Rapid assessment of climate change issues in Indonesia strategic environmental assessment (SEA-KLHS). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 644(1)*, 012045. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/644/1/012045>
- United Nations Development Programme. (2022). *Strategic plan 2022–2025*. UNDP. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/UNDP%20Strategic%20Plan%202022-2025.pdf>
- Wijayanti, S., Santika, Y. E., Rarasti, K. A., Alyodya, D. A., Rahmadana, M. I., Hidayat, A., & Sunarhadi, M. A. (2024). Pemanfaatan GIS dalam analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Pasar Kliwon. *ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research, 26(2)*, 100–110. <https://doi.org/10.20961/enviro.v26i2.99831>
- Zellner, M. L. (2024). Participatory modeling for collaborative landscape and environmental planning: From potential to realization. *Landscape and Urban Planning, 247*, 105063. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105063>